

SISTEM PENCATATAN

(Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.)

Penyusunan Neraca Awal,

Penyusunan Neraca Awal.

Neraca :

Laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu.

Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Lanjutan : Penyusunan ...

Rekening-rekening aset dan kewajiban berpasangan dengan rekening-rekening yang ada dalam ekuitas dana.

misal :

Kas berpasangan dengan SILPA ;

Persediaan berpasangan dengan Cadangan Persediaan ;

Piutang berpasangan dengan Cadangan Piutang ;

Investasi Jangka Panjang berpasangan dengan Diinvestasikan

Dalam Investasi Jangka Panjang ;

Aset Tetap berpasangan dengan Diinvestasikan dlm Aset Tetap ;

Utang Jangka Pendek berpasangan dengan Dana Yang Harus

Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

1. Aset.

1.1. Aset Lancar.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang; dan
- 4) persediaan

Kas Dan Setara Kas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau akun di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan ; kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Lanjutan : Kas ...

Kas di bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah ;
- 2) Setara kas, a.l : SUN, dan deposito < 3 bulan, dan ;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas di selain bendahara umum daerah :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas,
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas berasal dari sisa uang muka (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo akun di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

Lanjutan : Kas ...

Jurnal pencatatan saldo Kas untuk penyusunan Neraca Awal adalah :

(db) Kas Di Kas Daerah

(kr) SILPA

(db) Kas Di Bendahara Pengeluaran

(kr) SILPA

(db) Kas Di Bendahara Penerimaan

(kr) Pendapatan Yg Ditangguhkan

Catatan :

Pada awal periode, pengakuan pendapatan yang ditangguhkan harus direklasifikasi berdasarkan basis kas untuk mengakui penyetoran pendapatan ke Kas daerah, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (*reversing entry*) sbb :

(db) Pendapatan Yg Ditangguhkan

(kr) Kas Di Bendahara Penerimaan

Investasi Jangka Pendek.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- 3) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- 1) Deposito berjangka waktu 3 s/d 12 bulan,
- 2) Pembelian obligasi/ Surat Utang Negara (SUN),
- 3) Investasi jangka pendek lainnya.

Lanjutan : Investasi ...

Jurnal pencatatan saldo Investasi Jangka Pendek untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Investasi Jangka Pendek
(kr) SILPA

Catatan :

Pendebetan pada Rek. Investasi Jangka Pendek tidak perlu menyertakan rincian jenis investasi jangka pendeknya. Rincian jenis investasi jangka pendek cukup dicatat pada keterangan jurnal dan catatan atas laporan keuangan.

Piutang.

Piutang umumnya terdiri atas :

Piutang Pajak ; Piutang Retribusi ; Piutang Denda ; Bagian Lancar (pemberian) Pinjaman kepada ... ; Bagian lancar Tagihan Angsuran ; Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan ; Piutang lainnya → yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan/tahun anggaran.

Jurnal pencatatan saldo Piutang untuk Penyusunan Neraca Awal :

(db) Piutang ... (*misalnya : Piutang Pajak*)

(kr) Cadangan Piutang

Pada awal periode, pengakuan piutang harus direklasifikasi untuk mengakui pendapatan dengan basis kas, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (*reversing entry*) sbb :

(db) Cadangan Piutang

(kr) Piutang ... (*misalnya : Piutang Pajak*)

Persediaan.

Persediaan adalah barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat sebesar :

- biaya perolehan bila diperoleh dengan pembelian, atau ;
- biaya standar bila diperoleh dgn memproduksi sendiri, dan ;
- nilai wajar bila diperoleh dgn cara lainnya (donasi/rampasan).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Jurnal pencatatan saldo Persediaan untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Persediaan

(kr) Cadangan Persediaan

1.2. Investasi Jangka Panjang.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu : **(1) investasi nonpermanen**, dan ; **(2) investasi permanen**.

Investasi nonpermanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, misalnya : investasi dalam bentuk dana bergulir ; obligasi atau surat utang negara ; penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, misalnya : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya, dan ; Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup diatas.

Lanjutan : Investasi ...

Jurnal pencatatan saldo Investasi Jangka Panjang untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) *Ditulis sesuai dgn nama perkiraan ydm, ex : Penyertaan Modal Pemda*
(kr) *Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang*

Contoh :

(db) *Investasi Dalam Dana Bergulir*
(db) *Investasi Dalam Obligasi/SUN*
(db) *Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan*
(db) *penyertaan Modal Pemerintah Daerah*
(db) *Investasi Permanen Lainnya*
(kr) *Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang*

Aset Tetap.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- 1) Tanah ;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah/publik dan dalam kondisi siap digunakan, termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Lanjutan : Aset ...

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur ; alat pertanian ; alat kantor dan rumah tangga ; alat studio, komunikasi, dan pemancar ; alat kedokteran dan kesehatan ; alat laboratorium ; alat persenjataan ; komputer ; alat eksplorasi ; alat pemboran ; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian ; alat bantu eksplorasi ; alat keselamatankerja ; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi, → yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Lanjutan : Aset ...

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Lanjutan : Aset ...

Jurnal pencatatan saldo Aset Tetap untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Tanah

(db) Peralatan Dan Mesin

(db) Gedung Dan Bangunan

(db) Aset Tetap Lainnya

(db) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Catatan :

Jurnal tersebut adalah jurnal korolari yang digunakan sebagai pendamping jurnal untuk mencatat belanja barang modal.

Dana Cadangan.

Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya sesuai Peraturan Daerah, misalnya : pembentukan dana cadangan untuk pembangunan gedung perkantoran, jalan, dan pembelian tanah.

Jurnal pencatatan saldo Dana Cadangan untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Dana Cadangan

(kr) Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

- 1) Aset Tak Berwujud
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
- 3) Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 5) Aset Lain-lain

Lanjutan : Aset Lainnya ...

Aset tak berwujud meliputi : Software komputer ; Lisensi dan franchise ; Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan ; Hasil penelitian yg memiliki manfaat jangka panjang.

Jurnal pencatatan saldo Aset Tak Berwujud untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Aset Tak Berwujud

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh : tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Jurnal pencatatan saldo Aset Tak Berwujud untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Tagihan Penjualan Angsuran

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Lanjutan : Aset Lainnya ...

Tuntutan perbendaharaan : tuntutan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi : tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Jurnal pencatatan saldo TP/TGR utk penyusunan Neraca Awal :

(db) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Lanjutan : Aset Lainnya ...

Kemitraan dengan Pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa :

- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS), dan
- 2) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Lanjutan : Aset Lainnya ...

Jurnal pencatatan saldo BKS utk penyusunan Neraca Awal :

(db) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.

Jurnal pencatatan saldo BSK utk penyusunan Neraca Awal :

(db) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

(db) Dana Yg Hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk Panjang

(kr) Utang Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Lain-lain berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Jurnal pencatatan saldo Aset lain-lain utk penyusunan Neraca Awal :

(db) Aset Lain-lain

(kr) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

2. Kewajiban.

Kewajiban dapat muncul dari :

- 1) Transaksi Pertukaran
- 2) Transaksi Tanpa Pertukaran (ditentukan oleh aturan/hukum)
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (adanya interaksi dengan lingkungan, misalnya : kerusakan kepemilikan pribadi akibat aktivitas pemerintah)
- 4) Kejadian yang diakui Pemerintah yang membawa konsekuensi keuangan (kriteria : adanya otorisasi Legislatif dalam penggunaan sumber daya dan terjadinya transaksi dengan pertukaran (misal : perbaikan prasarana/sarana publik karena faktor tidak terkendali)/transaksi tanpa pertukaran (misal : pembayaran langsung kepada korban bencana alam).

Lanjutan : Kewajiban ...

Pada saat penyusunan Neraca Awal, ada beberapa jenis kewajiban yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Utang Perhitungan Fihak ketiga (Utang PFK) :

Kewajiban tersebut muncul karena pemerintah sampai akhir periode pelaporan belum melakukan peyeteran kepada fihak ketiga atas dana yang dipungut/dipotong oleh pemerintah dari pegawai/pihak lain, misalnya : pungutan/potongan iuran kesehatan, tabungan perumahan, dan pajak penghasilan.

Jurnal pencatatan mengakui utang PFK untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Kas Di Kas Daerah

(kr) Utang PFK

Catatan :

Dengan cara demikian, maka saldo kas di Kas Daerah mencerminkan adanya SILPA dan Kewajiban.

Lanjutan : Kewajiban ...

b. Bagian Lancar Utang jangka Panjang

Pada saat penyusunan Neraca Awal, pengakuan kewajiban tersebut dilakukan dengan mencatat jumlah kewajiban jangka panjang berikut mengklasifikasikan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun pencatatannya sebagai berikut :

Pengakuan Utang Jangka Panjang :

(db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

(kr) Utang Kepada ...*(misal : ... Kpd Pem Pusat)*

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan) :

(db) Utang Kepada ... *(misal : ... Kpd Pem Pusat)*

(kr) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

(db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(kr) Bagian Lancar Utang Kepada ...*(misal : ...Kpd Pem Pusat)*

Lanjutan : Kewajiban ...

Pada awal periode, bagian lancar dari utang jangka panjang harus direklasifikasi kedalam utang jangka panjang, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (*reversing entries*) sbb :

(db) Bagian Lancar Utang Kepada ...(*misal : ...Kpd Pem Pusat*)

(kr) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang

(kr) Utang Kepada ...(*misal : ... Kpd Pem Pusat*)

Lanjutan : Kewajiban ...

c. Utang kepada Pihak Ketiga (*accounts payable*).

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai tanggal neraca awal.

Inventarisasi utang kepada pihak ketiga dilakukan di setiap satuan kerja yg melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Jurnal pencatatan saldo Utang kepada Pihak Ketiga untuk penyusunan Neraca Awal :

(db) Dana Yg Harus Disediakan utk Pemb Utang Jk Pendek

(kr) Utang Kepada Pihak Ketiga

Lanjutan : Kewajiban ...

d. Utang Bunga.

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, (misalnya bunga utang dari perbankan). Inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk pos ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan neraca awal.

Jurnal pencatatan saldo Utang Bunga untuk penyusunan Neraca Awal adalah :

(db) Dana Yg Harus Disediakan Utk Pemb Utang Jk Pendek
(kr) Utang Bunga

3. Ekuitas Dana.

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pos ekuitas Dana terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu :

- 1) Ekuitas Dana Lancar;
- 2) Ekuitas Dana Investasi; dan
- 3) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain :

- 1) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA,
- 2) Pendapatan yang Ditangguhkan,
- 3) Cadangan Piutang,
- 4) Cadangan Persediaan, dan
- 5) Dana yg hrs disediakan utk pemb utang jk pendek.

Lanjutan : Ekuitas Dana ...

Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Pos Ekuitas Dana Investasi terdiri dari :

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang,
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap,
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya,
- 4) Dana yg Hrs Disediakan utk Pemb Utang Jk Panjang.

Lanjutan : Ekuitas Dana ...

Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan disajikan pada Pos Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.

Contoh Neraca : Lihat lampiran SAP